

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BERAS MISKIN (RASKIN)
DI KECAMANTAN TANJUNGANOM KABUPATEN NGANJUK
(Studi Deskriptif Pada Kelurahan Sumberkepuh)
YENIK PUJOWATI, S.AP.,M.AP
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL&ILMU POLITIK**

Abstrak

Kemiskinan tentunya bukanlah masalah sosial yang hanya dialami oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia, namun dialami juga oleh negara-negara maju seperti amerika. Di Indonesia kemiskinan terus menjadi masalah sosial yang fenomenal sepanjang sejarah Indonesia. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak indonesia tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi untuk masa depan, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi kekota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas. Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yakni kemiskinan alamiah dan karena buatan. Kemiskinan alamiah terjadi antara lain akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan "buatan" terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia, hingga mereka tetap miskin. Maka itulah sebabnya para pakar ekonomi sering mengkritik kebijakan pembangunan yang sering terfokus pada pertumbuhan ketimbang pemerataan.

Kata Kunci: *Kemiskinan, Pelayanan Publik, Kebijakan Pembangunan*

Abstract

Poverty is certainly not the only social problems experienced by developing countries such as Indonesia, but experienced by the developed countries like the United States. In Indonesia, poverty continues to be a social problem that is phenomenal in the history of Indonesia. Poverty has made millions of children Indonesia can not get an education of quality, difficulty to finance health care, lack of savings and investments for the future, lack of access to public services, lack of jobs, lack of social security and protection of the family, the strengthening of urbanization kekota, and worse, poverty causes millions of people to meet the needs of food, clothing and shelter are limited. There are two conditions that cause poverty can happen, namely poverty because of natural and artificial. Poverty naturally occur partly as a result of limited natural resources, the use of low technology and natural disasters. Poverty "artificial" occurred because the institutions that exist in the community to make some community members are not able to master the economic means and various other facilities available, so they remain poor. So that is why economists are often criticized development policies are often focused on growth rather than equity.

Keywords: *Poverty, Public Service, Policy Development*

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Kemiskinan tentunya bukanlah masalah sosial yang hanya dialami oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia, namun dialami juga oleh negara-negara maju seperti Amerika. Di Indonesia kemiskinan terus menjadi masalah sosial yang fenomenal sepanjang sejarah Indonesia. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak Indonesia tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi untuk masa depan, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas.

Berdasarkan data Badan Pusat dan Statistik (BPS) Maret 2015, persentase jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 11,25% atau 28,28 juta jiwa orang. Persentase ini, sedikit menurun, jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Indonesia Maret 2014 yang berada pada persentase 11,37% atau mencapai 28,07 juta jiwa. Data tersebut menunjukkan adanya penurunan persentase penduduk miskin Indonesia, di selang waktu satu tahun terakhir ini. Persentase tersebut juga menunjukkan bahwa ada usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menangani masalah sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yakni kemiskinan alamiah dan karena buatan. Kemiskinan alamiah terjadi antara lain akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan "buatan" terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia, hingga mereka tetap miskin. Maka itulah sebabnya para pakar ekonomi sering mengkritik kebijakan pembangunan yang sering terfokus pada pertumbuhan ketimbang pemerataan.

Kebijakan pemerintah peraturan nomor 166 tahun 2014 tentang Program percepatan penanggulangan kemiskinan, dan undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin, peraturan dalam negeri nomor 42 tahun 2010 tentang tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Provinsi dan kabupaten / kota, bahwa Ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan kemiskinan, mengamanatkan kepada menteri dalam negeri untuk mengatur tata kerja dan penyelarasan kerja, serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Ada beberapa alasan mengapa Program Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menarik untuk dibahas: *Alasan Pertama*, masalah kemiskinan adalah permasalahan global yang hampir dialami oleh semua Negara di dunia, termasuk di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Oleh karena itu, permasalahan kemiskinan adalah permasalahan yang selalu menarik untuk dikaji guna menemukan solusi penanggulangannya. *Alasan kedua* mengapa Program Penanggulangan Kemiskinan ini menarik untuk dibahas adalah Program Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dianggap sebagai solusi terbaru dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan setelah program-program pemerintah yang sebelumnya dianggap kurang atau tidak mampu menekan dengan maksimal angka kemiskinan di Indonesia.

Implementasi program penanggulangan kemiskinan (TNP2K) untuk melaksanakan kebijakan tersebut dengan mengacu pada teori pendekatan Top-down dan Bottom-Up. Dalam hal ini pemerintah berharap masyarakat dapat terpacu untuk bisa menembus perangkap kemiskinan yang melekat pada dirinya sehingga dapat mengurangi jumlah masyarakat miskin. Salah satunya adalah pelaksanaan Program penyaluran beras untuk Keluarga miskin (Raskin).

Berdasarkan Hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui Implementasi Kebijakan Beras Miski (Raskin) yang telah dilaksanakan dikecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk (studi deskriptif pada kelurahan sumberkepuh) Berdasarkan Peraturan Nomor 166 Tahun 2014.

1.2. Perumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang serta fenomena diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses implementasi pendistribusian Raskin pada kelurahan sumberkepuh, Di Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk ?
2. Bagaimana relasi kepentingan antar aktor dalam proses pendistribusian Raskin dikecamatan Tanjunganom kabupaten nganjuk ?

1.3. Tujuan Penelitian.

Dengan mengacu pada latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui bagaimana proses implementasi pendistribusian beras miskin (Raskin) yang dilaksanakan dikecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, pada kelurahan sumberkepuh.

2. Untuk Mengetahui relasi kepetingan antar aktor dalam proses pendistribusian Raskin di Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

1.4 Manfaat Penelitian.

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat :

1. Secara praktis, sebagai salah satu upaya untuk lebih memperbaiki program kebijakan Pendistribusian raskin supaya lebih tepat sasaran dan adil Di kecamatan tanjunganom kabupaten nganjuk, dalam proses implementasi kebijakan beras miskin (Raskin) pada kelurahan sumberkepuh Di kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.
2. Secara teoritis, untuk memberikan masukan terhadap implementor dalam memperbaiki implementasi kebijakan.

2.1. Landasan Teori.

Menurut Thomas R. Dye (1981) Kebijakan publik adalah apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Pengertian yang diberikan Thomas R. Dye ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Selain itu, kajiannya yang hanya terfokus pada negara sebagai pokok kajian. Dye (1978) Mendefinisikan kebijakan publik sebagai “Whatever governments choose to do or not to do.”, yaitu segala sesuatu atau apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye juga memaknai kebijakan publik sebagai suatu upaya untuk mengetahui apa sesungguhnya yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa mereka melakukannya, dan apa yang menyebabkan mereka melakukannya secara berbeda-beda.

Menurut Dunn (1994), proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung, yaitu : 1). penyusunan agenda. 2). formulasi kebijakan. 3). adopsi kebijakan. 4).implementasi kebijakan. 5). penilaian kebijakan.

Orientasi Aktor dalam perumusan kebijakan publik ini didasari pemikiran sebagai berikut:

- 1). bahwa proses perumusan kebijakan publik perlu memperhitungkan secara seksama eksistensi orientasi dan kepetingan aktor-aktor yang terlibat sebagai stakeholder dari kebijakan yang akan dibuat, 2). kenyataan bahwa latar bekalang sosial ekonomi masing-masing aktor tidaklah sama. 3). kebijakan publik yang partisipatif merupakan paradigma yang dapat terwujud melalui proses orientasi antar aktor yang intensif yang memungkinkan

pengeseran pola sikap dan orientasi sebagai bentuk akomodasi antar aktor yang terlibat. (Jurnal masyarakat kebudayaan dan politik Volume 21, Nomor 2:115-130).

2.2. Model implementasi yang dikembangkan oleh George C.Edward III (1980).

Penggunaan model yang ditulis Edwards, Goerge III. menurut, Edwards, Goerge III (1980-1) Menegaskan bahwa masalah utama dari administrasi publik adalah lack of attention to implementations. Di katakannya, without effective implementation the decission of policymakers will not be carried out successfully. Edward menyarankan untuk memperhatikan empat (4) isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif yaitu :

1. *Communication* (komunikasi) berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat.
2. *Resources* berkenaan dengan ketersediaan (sumber daya) pendukung, khususnya sumber daya manusia. hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk carry out kebijakan secara efektif.

Berikutnya kewenangan / kekuasaan (authority), adalah kewenangan untuk memilih banyak bentuk atau bervariasi untuk menjalankan sebuah kebijakan publik dengan layak.

3. *Dispostion*. (Disposisi) berkenaan dengan kesediaan dari para implementor untuk carry out kebijakan publik tersebut. Kecapakan saja tidak mencukupi, tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Dalam konteks ini implementor memiliki tindakan sendiri dalam menhadapi persoalan khusus ketika kebijakan tidak mengatur atau mengatur berbeda dengan keadaan di lapangan.
4. *Bureaucratic, Structures* (struktur birokrasi) : Berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi bureaucratic fragmentation karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif.

2.3. Model Aktor Implementasi Kebijakan yang dikembangkan oleh Riant Nugroho (2012 : 706) dapat dilihat bawah ada empat (4) pilihan aktor implementasi yang sesungguhnya yaitu :

1. Pemerintah : meliputi kebijakan-kebijakan yang masuk dalam kategori directed atau berkenaan dengan eksistensi negara bangsa. Kebijakan disini disebut sebagai existensial driven policy. Pertahanan, keamanan, penegakan keadilan, dan sebagainya. meskipun masyarakat dilibatkan, perannya sering kali dikategorikan sebagai perifer.

2. Pemerintah pelaku utama, masyarakat pelaku pendamping. kebijakan-kebijakan yang government driven policy. termasuk pelayanan KTP dan Kartu keluarga yang melibatkan jaringan kerja non pemerintah ditingkat masyarakat.
3. Masyarakat pelaku utama, pemerintah pelaku pendamping. Kebijakan-kebijakan yang societal driven policy. disini termasuk kegiatan pelayanan publik yang dilakukan oleh pelayanan masyarakat, yang mendapat subsidi dari pemerintah.
4. Masyarakat sendiri, yang dapat disebut people (atau private) driven policy, termasuk didalamnya kebijakan pengembangan ekonomi yang dilaksanakan oleh masyarakat melalui berbagai kegiatan bisnis.

3.1. Metode Penelitian

Bentuk Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif.

Lokasi penelitian.

Untuk memperoleh data pada penelitian ini, penulis melakukan pengambilan data langsung di desa sumberkepuh desa beni kecamatan Tanjunganom kabupaten nganjuk.

Informan Penelitian

1. Informan kunci : Kepala desa, sekertaris desa, bendahara.
2. Informan tambahan yaitu masyarakat di desa sumberkepuh beni, RT/RW. kecamatan tanjunganom
3. Informan termasuk lainnya KESRA di Kecamatan Tanjunganon Kabupaten Nganjuk.

Teknik pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Ovservasi (pengamatan), wawancara kualitatif, Dokumen-dokumen kualitatif.

Teknik Analisa data.

Sedangkan analisis data dalam penelitian ini digunakan analisis kualitatif dengan langkah-langkah model analisis interaktif (*Interactive Model Of Analisis*) seperti yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992) yang terdiri dari tiga komponen: Reduksi data, Penyajian Data, Menarik Kesimpulan/Verifikasi, adapun untuk melihat derajat

kepercayaan atau kebenarana atas hasil penelitian dilakukan teknik keabsahan data. Moleong (2000) menetapkan keabsahan data dengan menggunakan empat teknik pemeriksaan, yaitu : derajat kepercayaan (Credibility), Keterahlian (Transferability), Ketergantungan (Dependability), Kepastian (Comfirmability).

4.1.PEMBAHASAN

Instrumen yang di pilih dalam Implementasi Pendistribusian Raskin Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

A. Tujuan dan Sasaran Raskin.

Tujuan Mengurangi beban pengeluaran RTS-PM melalui pemenuhan aebagai kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

Sasaran, Berkurangnya beban pengeluaran 15.530.897 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi sebanyak 15 kg/RTS/bulanan atau setara 180 KG/RTS/tahun dengan harga tebus Rp.1.600.00/kg netto dititik Distribusi (TD).

Manfaat Program Raskin pada tahun 2015, dalam peningkatan ketahan pangan ditingkat rumah tangga sasaran, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan

Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD) maupun ekonomi (Harga jual yang terjangkau) kepada RTS.

Sebagian pasar bagi hasil usaha tani padi, stabilisasi harga beras dipasaran, dan pengendalian inflasi melalui intervensi pemerintahan dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp. 1.600,-/Kg, dan menjaga stok pangan nasional membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

Implementasi pendistribusian beras miskin di Kecamatan Tanjunganon Kabupaten Nganjuk berdasarkan tujuan dan sasaran raskin bisa di lihat pada Tabel Penjadwalan Dropping Program Raskin/Rastra Untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk.

Tabel. 1

Penjadwalan Drouping Program Raskin/ Rastra Untuk Rumah Tangga Sasaran
Penerima Manfaat (RTS-PM) Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk Bulan
Februari Alokasi Februari 2015

N o	Hari/Tangg al Jam	Kecamatan/Desa Tujuan	Pagu Raski n (RTS- PM)	Kg/Rts -Pm	Jumlah Penerim a Beras (Kg)	Harg a Per Kg	Jumlah (Rp)	Keterangan
	Hari ke 1							
	Senin							
	16-11-2015	Kec.Tanjunganom						Gbb.Candirejo
1	09.00-11.00	Getas	463	15	6.945	1.600	15.528.000	
2	10.00-17.00	Banjaranyar	647	15	9.705	1.600	13.632.000	
3	09.00-13.00	Kedungombo	568	15	8.520	1.600	13.632.000	
4	13.00-15.00	Sonobekel	499	15	7.485	1.600	11.976.000	
5	15.00-18.00	Warujayeng	847	15	12.705	1.600	20.328.000	
6	13.00-16.00	Ngadirejo	293	15	4.395	1.600	7.032.000	
		Jumlah	3.317		49.755		79.608.000	
		Kec.Nganjuk						Gbb.Candirejo
1	08.00-09.00	Warungotok	286	15	4,290	1.600	6.864.000	
2	08.00-09.00	Begadung	413	15	6,195	1.600	9.912.000	
3	10.00-11.00	Mangudikaran	235	15	3,525	1.600	5.640.000	
4	08.00-08.30	Kauman	74	15	1.110	1.600	1.776.000	
5	12.00-13.00	Ploso	312	15	4,680	1.600	7.488.000	
6	14.00-15.00	Kramat	316	15	4,740	1.600	7.584.000	
			1.636		24.540		39.264.000	

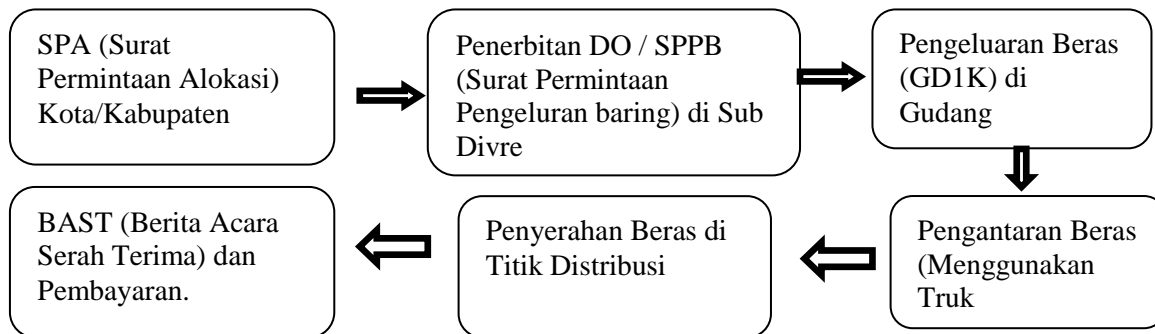
Data Dari Kecamatan Tanjunganom

Keterangan :

- Hari ke 1 datang ke desa. penggedroupan dari bulog, (Sistem pengedroupan dari bulog dan menunjukkan waktu)
- Hari dan waktu menunjukkan jam sampai tepat ke desa - desa.
- Pagu raskin (rumah tangga sasaran - penerima manfaat) : (pagu raskin RST-PM) menunjukkan jumlah 463 desa sidoharjo yaitu jumlah KK raskin RTS - PM.
- Cara pembagiannya ada petugas perangkat desa yang khusus untuk menangani raskin. masyarakat ini menunjukkan jumlah pagu raskin atau jumlah perkaka (KK) yang di droup dari bulog.
- RTS-PM : memperoleh 15kilo per KK, jumlah banyaknya beras atau jumlah seluruh perdesa. (jumlah Ton beras yang di droup dari bulog)
- Harga perkilo: harga menunjukkan harga perkilo beras (bersubsidi).
Misalnya : kalau harga pasaran diluar perkilonya 7.500. dari beras pemerintah dijual perkilonya (1.600kilo bersubsidi) jadi masyarakat memperoleh perkilonya rata - rata perorangnya 15kilo X 1600.) per KK.
- GBB : gudang beras bulog

B. Implementasi Mekanisme Penyaluran Raskin Di Kecamatan Tanjunganom dan Desa / Kelurahan Sumberkepuh Beni.

Gambar 1
Alur Mekanisme Penyaluran Raskin



Data Dari Kecamatan Tanjunganom dan Desa/kelurahan.

Keterangan :

1. Berdasarkan pagu raskin, bupati/walikota/ketua Tim Koordinasi Raskin kabupaten / kota atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota menerbitkan surat permintaan Alokasi (SPA) kepada perum BULOG.
2. Berdasarkan SPA, perum bulog sub Divre menerbitkan, SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan.
3. Sesuai dengan SPPB/DO maka perum BULOG menyalurkan beras sampai ke TD.
4. Sebelumnya penyaluran, dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi di Gudang perum BULOG, yang ditandatangani oleh BULOG dan Tim Koordinasi Raskin kabupaten/kota/kecamatan/pelaksana distribusi.
5. Di DT dilakukan serah terima beras antara perum BULOG dengan tim koordinasi raskin / pelaksana distribusi dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
6. Pada prinsipnya penyaluran raskin dilakukan setiap bulan, jika terdapat kebijakan daerah dan atau kendala antara lain musim panen, kondisi geografi, iklim/cuaca, dan hambatan transportasi, sehingga penyaluran raskin tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan disuatu wilayah, maka penyaluran raskin dapat diatur lebih lanjut didalam Juknis oleh pemerintah daerah.

C. Penyaluran Beras Raskin dari TB ke RTS-PM.

1. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran raskin dan TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM.
2. Pelaksanaan penyaluran raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh pelaksana distribusi dengan menyerahkan raskin kepada RTS-PM sebanyak 15kg/RTS/bulan, dan dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan. Bisa di lihat Tabel Model RTS-PM, di catat DPM-1 dan DPM-2 dibawah ini :

Tabel. 2
Daftar Penerima Manfaat
Program Raskin Tahun 2015

MODEL DPM - 1

PROVINSI : JAWA TIMUR
KABUPATEN : NGANJUK
KECAMATAN : TANJUNGANOM
KELURAHAN/DESA : SUMBERKEPUH / BENI

N0	NAMA KEPALA RUMAH TANGGA	NAMA PASANGAN KEPALA RUMAH TANGGA	NAMA ANGGOTA RUMAH TANGGA LAIN DIATAS 18TAHUN	ALAMAT
1	Sukamto	Indri yanti	-	Beni
2	Agus	Aprilian	-	Beni
3	Ridho	Siti khoirah	-	Beni
4	Sunarko	Wiwik	-	Beni
5	Topa	Azizah	-	Beni
6	Parjo	Surnati	-	Beni
7	Fattah	Emy aprilia	-	Beni
8	Iwan	Paitun	-	Beni
9	Paino	Lilik sri astuti	-	Beni
10	Didik	Nila wati	-	Beni
JUMLAH				

Nganjuk, 2015

Mengetahui/Disahkan
Camat,

Ditetapkan
Kepala desa atau lurah

Tanda tangan & stempel
Nama Jelas

Tanda tangan & Stempel
Nama Jelas

Keterangan :

DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di desa/kelurahan setelah dilakukan pemutakhiran data RTS-PM yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program Raskin 2015 melalui mekanisme musyawarah desa / musyawarah kelurahan (Mudes/Muskel).

Yaitu : contoh kelurahan/desa beni, yang mendapatkan Raskin/Daftar Penerima Manfaat. kepala rumah tangga Sukardi, nama pasangan kepala rumah tangga Kustini, kelurahan sumberkepuh beni, kecamatan tanjunganom.

MODEL DPM - 2

Tabel. 3
DAFTAR PENERIMA MANFAAT PROGRAM RASKIN TAHUN 2015
(BULAN PEBRUARI TAHUN 2015)

PROVINSI : JAWA TIMUR
KABUPATEN : NGANJUK
KECAMATAN : TANJUNGANOM
KELURAHAN/DESA : SUMBERKEPUH BENI
RT/RW : 003/010

NO	NAMA	Nama Lengkap	JUMLAH Kg	Harga Rp	Tanda Tangan
1	Sukamto	Sukamto	15	1.600	
2	Agus	Agus setiawan	15	1.600	
3	ridho	Ridho gunawan	15	1.600	
4	Sunarko	Sunarko	15	1.600	
5	Topa	Topa Ali Imron	15	1.600	
6	Parjo	Parjo	15	1.600	
7	Fattah	Fattah prasetyo	15	1.600	
8	Iwan	Iwan hanafi	15	1.600	
9	Parno	Parno	15	1.600	
10	Didik	Didik	15	1.600	
	JUMLAH				

Nganjuk, 2015

Mengetahui/Disahkan
Kepala Desa / Lurah

Titik Distribusi
Ketua Pelaksana Distribusi

Tanda tangan & stempel
Nama Jelas

Tanda tangan & Stempel
Nama Jelas

Keterangan :

DPM-2 adalah Model Daftar Penyaluran Raskin di desa/kelurahan.

Misalnya : Nama lengkap sukardi, sebagai kepala rumah tangga mendapatkan jatah 15 kilo, per KK, dengan harga perkilonya 1.600, jadi harga perkilo 1.600 x 15kilo, setelah menerima jatah beras mengisi tanda tangan, mengetahui kepala desa sumberkepuh beni dan Tim Distribusi ketua pelaksana distribusi.

D. Model Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR).

1. Harga tebus raskin dari (HTR) sebesar Rp.1.600,00/kg di TD
2. Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada pelaksana distribusi Raskin dilakukan secara tunai. pelaksana distribusi raskin langsung menyetorkan uang HTR tersebut ke rekening perum Bulog melalui bank setempat atau disetorkan langsung kepada perum bulog setempat. pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam petunjuk Teknis (juknis) sesuai dengan kondisi setempat.
3. pada prinsipnya harga yang dibayarkan oleh RTS-PM sesuai dengan HTR sebesar Rp. 1.600,-/kg. apa bila ada biaya tambahan dalam penyaluran dari TD ke TB yang kurang atau tidak dialokasikan dalam APBD dapat dibantu oleh masyarakat secara sukarela dan diatur lebih lanjut didalam Juknis.

Data Dari Kecamatan Tanjunganom dan Desa/kelurahan.

4.2. Arah Umum kebijakan program Raskin Ke depannya.

1. Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun ke depan, kebijakan program raskin masih tetap dilanjutkan dengan mekanisme yang sudah berjalan selama ini, namun dengan perbaikan-perbaikan.
2. Kebijakan program raskin memiliki banyak fungsi, seperti : Stabilisator harga, pendukung ketersediaan stok pangan nasional, dan keterjangkauan harga, maka stok raskin masih tetap dipegang oleh Perum BULOG.
3. Mekanisemen penyaluran raskin harus melalui aparat wilayah setempat, seperti : aparat desa / kelurahan, RW dan RT, agar tidak menimbulkan masalah.
4. Hal penting dalam pengelolaan program Raski, adalah: Validasi data, raskin yang berkualitas / layak konsumsi, dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program raskin sebagai pengawasan / kontrol.
5. Jumlah (Kuantum) beras raskin yang disalurkan kepada rumah tangga sasaran (RTS), tetap sebanyak : 15 Kg/RTS/bulan.
6. Program perlindungan Sosial pemerintah kepada masyarakat (pendidikan, kesehatan, cash transfer dan Raskin) harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

4.3. Aktor-Aktor Yang Terlibat Dalam Pendistribusian Raskin.

Setiap kebijakan tidak lepas dari peran berbagai aktor, Aktor dalam kebijakan dapat berarti individu-individu atau kelompok-kelompok, dimana para pelaku ini terlibat dalam kondisi tertentu sebagai suatu *subsistem* kebijakan. Menurut Howlet dan Ramesh (1999:52), Aktor-aktor dalam kebijakan terdiri atas lima kategori, yaitu sebagai berikut:

- 1) Aparatur yang dipilih (*elected official*) yaitu berupa eksekutif dan legislative.
- 2) Aparatur yang ditunjuk (*appointed official*), sebagai asisten birokrat, biasanya menjadi kunci dasar dan sentral figure dalam proses kebijakan atau subsistem kebijakan.
- 3) Kelompok-kelompok kepentingan (*interest group*), Pemerintah dan politikus seringkali membutuhkan informasi yang disajikan oleh kelompok-kelompok kepentingan guna efektifitas pembuatan kebijakan atau untuk menyerang oposisi mereka
- 4) Organisasi-organisasi penelitian (*research organization*), berupa Universitas, kelompok ahli atau konsultan kebijakan.
- 5) Media massa (*mass media*), sebagai jaringan hubungan yang krusial diantara Negara dan masyarakat sebagai media sosialisasi dan komunikasi melaporkan permasalahan yang dikombinasikan antara peran reporter dengan peran analis aktif sebagai advokasi solusi.

Aktor - aktor yang terlibat dalam kebijakan Pelaksanaan pendistribusian Raskin, Yaitu Kepala desa / lurah / kepala pemerintahan setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan program raskin di wilayahnya, memilih dan menetapkan salah satu dari 4 (empat) alternatif pelaksanaan distribusi raskin tim koordinasi raskin kecamatan desa / kelurahan. sebagai berikut :

1. Kedudukan

Pelaksana distribusi raskin berkedudukan dibawah ini dan bertanggung jawab kepada kepala desa /lurah/pemerintahan setingkat.

2. Tugas.

Pelaksana distribusi raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HPB serta menyelesaikan administrasi.

3. Fungsi

Pelaksana distribusi raskin mempunyai Fungsi :

- a. Periksa dan penerimaan/penolakan raskin dari satker raskin di titik distribusi (TD). Untuk desa/kelurahan yang titik distribusinya tidak berada di desa/kelurahan,maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolakan raskin diatur dalam petunjuk teknis (juknis)
- b. Pendistribusian dan penyerahan raskin kepada RTS – PM dititik bagi (TB).
- c. Penerima HTR raskin dari RTS-PM secara tunai dan disetorkan ke rekening bank yang ditunjuk oleh perum BULOG atau apabila tidak tersedia fasilitas perbankan setempat dapat menyetor langsung secara tunai kepada perum BULOG
- d. Penyelesaian HTR dan administrasi penyaluran raskin yaitu Penadatangan berita.
- e. Membuat daftar realisasi penjualan beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke tim Koordinasi raskin kabupaten/kota melalui Tim koordinasi Raskin kecamatan.

Aktor - aktor yang keterlibatan langsung dalam kegiatan raskin setiap kepetingan RT/RW diakomodir dengan baik oleh kelurahan melalui Muskel (musyawarah kelurahan). Muskel dilakukan setiap bulan melalui pertemuan atau rapat dengan RT/RW setempat. Muskel adalah forum pertemuan musyawarah ditingkat kelurahan untuk menetapkan daftar nama RTS-PM yang melibatkan aparat kelurahan, ketua lembaga ketahanan masyarakat kelurahan, ketua RW, Ketua RT dan perwakilan RTS-PM raskin di kelurahan setempat yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan untuk memutakhirkan RTS-PM.

Dalam hal ini RT/RW berperan dalam mengatur Raskin kepada warganya atas kesepakatan bersama, seperti yang diungkapkan oleh ibu X. "Beras raskin untuk orang miskin, yang alokasinya tentu saja untuk diberikan orang yang tidak punya, manfaatnya

sangat membantu masyarakat miskin, apa bila masyarakat tidak mampu membeli beras diluar sangat mahal harganya, masyarakat yang menerima beras jatah dari pemerintah harganya sangat murah per kilonya 1.600/kg, dari petunjuk Juklis, berhubung ada biaya alat transportasi kesepakatan antara RT, RW, kepala desa, kecamatan, maka dijual kemasyarakat 2000/kg, jadi masyarakat membelinya 2.000per kg. seharusnya setiap kepala rumah atau per KK mendapatkan jatah raskin 15kg tetapi dari kebijaksanaan dari kecamatan, kepada desa, RT, RW dan mendapat persetujuan. semua dibagi rata setiap orang mendapat 5 kg/perbulan tentang Raskin". Menurut ketua RW ada warganya yang sudah tergolong mampu dapat kartu Raskin, sebaliknya yang miskin tidak dapat karena waktu pendataan RT dan RW tidak tau, sehingga pengambilan keputusan untuk pembagian raskin atas musyawarah warga dan diputuskan oleh ketua RW. dari pernyataan diatas mengenai bagaimana proses pendistribusian raskin menunjukkan bahwa masih belum ada koordinasi dari pemerintah, BPS maupun masyarakat.

5.1. KESIMPULAN.

1. Implementasi kebijakan peraturan pemerintahan nomor 166 tahun 2014, implementasi pendistribusian raskin juga telah disempurnakan dari sisi pencapaian sasaran dan mekanisme distribusinya sehingga diharapkan dapat mencapai 6T (Tepat warga yang menerima, Jumlah beras yang disalurkan, harga yang ditebus, kualitas beras yang diterima, waktu penyaluran dan administrasinya (tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi)
2. Implementasi kebijakan beras miskin (raskin) Kecamatan Tanjunganom kabupaten nganjuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor 166 tahun 2014, pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, namu dalam proses implementasi kebijakan terdapat beberapa tahapan yang belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prinsip (merit system), disebabkan oleh, selain kebijakan yang kurang sempurna, juga karena banyaknya aktor-aktor yang terlibat didalamnya, masing-masing aktor tersebut mempunyai peran dan cara kerja yang berbeda-beda.
3. Implementasi kebijakan beras miskin (Raskin) diKabupaten Nganjuk juga mengalami permasalahan umum Raskin : Kualitas beras yang perlu ditingkatkan tentang kualitas beras sesuai standar kualitas beras. (dilihat kondisi berasnya jelek agak ke hitam-hitaman dan banyak kutu dikeluhkan masyarakat adalah berbau apek dan berkutu) dan Kualitas beras dari tahun ke tahun relatif sama. Pembayaran yang tidak lancar, Admnistrasi juga kurang lancar.

4. Kebijakan pemerintahan daerah kabupaten nganjuk seharusnya Bulog sebagai penyalur raskin didaerah diharapkan terus meningkatkan kualitas beras dari waktu ke waktu.
5. Aktor-aktor pendistribusian raskin menurut ketua RT/RW masih ada warga nya yang tergolong mampu mendapat kartu miskin, sebaliknya yang miskin tidak dapat kartu miskin. dan Pagu yang tidak cukup untuk memfasilitasi seluruh masyarakat miskin,

SARAN.

1. Validasi data RTS-PM hendanya dilakukan setiap tahun sesuai kondisi dilapangan dengan melibatkan BPS
2. Bulog sebagai penyalur raskin didaerah diharapkan terus meningkatkan kualitas beras dari waktu ke waktu.
3. Koordinasi antar kelurahan atau pemerintah daerah maupun pusat dan SKPD diprovinsi dan kabupaten/kota harus ditingkatkan untuk keberhasilan program Raskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Wahab Solichin.2008. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Cetakan IV, Bumi Aksara, Jakarta.
- Abdul, Wahab Solichin, 1990. *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*, Jakarta, Rineka cipta
- Anderson, James. E., 1975. *Public policy making*, Thomas Nelson and sons Ltd., Great Britain.
- Anderson, James. E., 1979. *Publik policy Making*, Holt, Rinehart and Winston, New York.
- Edwards III, George C.1980. *Implementing Public Policy*. Washinton : Cogressional Quarterly Inc.
- Dunn, William N. 1994. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Gadjadarmada University Press.
- Dye, Thomas R., 1981, *Understanding Publik Policy*, New Jersey: Prentice Hall.
- Howlett, Michael and M. Ramesh. 1999. *Studying Public Policy : Policy Cycles and Policy Subsystem*. Oxford : Oxford University Press.
- Moleong, Lexy J.2002. *Metologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisa Data Kualitatif*, Edisi Terjemahan, Universitas Indonesia (UI) Press, Jakarta.
- Islamy, M. Irfan. 1992. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Cetakan VII, Bumi Aksara, Jakarta.

Peraturan pemerintah Nomor 166 tahun 2014 Tentang Percepatan penanggulangan kemiskinan.

Petunjuk Teknis Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tahun 2015 (JUKNIS RASKIN) Kabupaten Nganjuk.

Riant Nugroho. 2012. *Publicy Policy*. penerbit PT. Elex Media Komputindo.

[Http://www. Konsep Kemiskinan.com](http://www.KonsepKemiskinan.com).